



DINAS PERHUBUNGAN

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

FINAL
TAHUN

2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah periode 11 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Penyusunan Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021, sehingga target penetapan RKA/DPA- SKPD Tahun 2021 dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugrah dan hidayah-Nya.

Akhirulkalimat, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kuala Tungkal, 9 September 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
A. Faktor Penyebab Terpenuhinya program dan kegiatan	20
B. Implikasi terhadap capaian Program/kKegiatan	21
C. Kebijakan Dan Solusi	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	24
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	29
2.4.1 Review Terhadap Analisis Kebutuhan Anggaran Dinas Perhubungan	29
2.4.2 Review Terhadap Forum OPD	39
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program Masyarakat	41
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran	43
3.2 Program dan Kegiatan	43
3.4 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020	46
BAB IV KESIMPULAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Melalui Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2019	25
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	31
Tabel 3.1 Target Dan PAD Tahun 2021	46
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	47
Tabel 3.3 Daftar Usulan Pokir DPRD Tahun 2021	58
Tabel Daftar Usulan APBN Dinas Perhubungan Tahun 2021	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2020 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

Dari sub agenda nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global

- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan menjadi salah satu sub agenda prioritas nasional dengan sasaran (1) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (2) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Jalan Perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/jam (3) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja OPD) merupakan tahapan awal dalam penyusunan Renja OPD. Renja OPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;
- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah

dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2019. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2019 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 (tabel T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kefiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
						Target Renja perangkat Daerah tahun 2019	Satuan	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Satuan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6		7		8	9	10	11
	PENDAPATAN												
	PENDAPATAN ASLI DAERAH												
	Retbusi Gedung PKB												
	Retribusi Terminal												
	Retribusi Kepelabuhan												
	BELANJA												
	BELANJA TIDAK LANGUSNG												
	Belanja Gaji dan Tunjangan												
	BELANJA LANGSUNG												

	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	%	100		12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	peningkatan prasarana transportasi	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa media cetak dan elektronik	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Penyediaan makanan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bln	72	36	12	Bln	12	Bln	100%	12	24	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam	%	100	100	100	%	100	%	100%			
	Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit	2	1	0	Unit	0	Unit	100%	0	0	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Unit	79	17	0	Unit	0	Unit	100%	0	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	16	9	7	Unit	7	Unit	100%	7	14	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	32	2	32	Unit	32	Unit	100%	32	64	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	Unit	5	2	2	Unit	2	Unit	100%	2	4	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	Unit	155	51	5	Unit	54	Unit	100%	54	108	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pakaian Dinas tersedia	%	100	100	100	%	100	%	100%		100	
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	Stel	660	389	125	Stel	125	Stel	100%	125	250	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat	%	100	100	100	%	100	%	100%		100	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dok	30	15 Dok	5 Dok	Dok	5	Dok	100%	5	10	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Unit										
	Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan terminal/elabuhan	terlaksananya kegiatan pemeliharaan pelabuhan dermaga dan halte sungai	Unit	46	16 Unit	10	Unit	10	Unit	100%	13	23	

	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan layanan angkutan	%	100	100	100	Unit	100	Unit	100%			
	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dan Parkir	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Dok	10	6 Dok	2	Dok	2	Dok		2	4	
	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	Kali	80	48 Kali	16	Kali	16	Kali		16	32	
	Forum lalu lintas angkutan jalan	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	Kali	20	12 Kali	4	Kali	4	Kali		4	8	
	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah pengamanan pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	Kali	40	24 Kali	6	Kali	6	Kali		8	14	
	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungan dan pelabuhan penyeberangan	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	Dok	10	6 Dok	2	Dok	2	Dok		2	4	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase menurunnya Pelanggaran Darat	%	100									
	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	terlaksananya operasi	kali	150	90 Kali	30		30			30	60	
	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Tertib Kendaraan yang lulus uji	Unit	2400									
	uji kelaikan pengoperasian k	(uji kelaikan kendaraan	Unit	10000	4020 Unit	1210							

Kuala Tungka, Desember 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001

Pada tahun 2019 total anggaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar **Rp. 6.249.026.800,00** dengan rincian Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.050.522.220,00** dan Belanja Tidak Langsung **Rp. 3.356.141.500,00**, dan diuraikan dalam pelaksanaan **8 Program dan 24 Kegiatan**.

Evaluasi Realisasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019 melalui rincian program dan kegiatan (Belanja Langsung) tersebut meliputi :

1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran. Indikator Programnya adalah Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar **Rp. 675.034.220**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat.. Indikator Programnya adalah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%** . Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar **Rp. 557.330.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator programnya adalah jumlah pengadaan pakaian dinas. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar **Rp. 62.500.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

4) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional yang dilaksanakan dinas perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator programnya adalah Persentase Dokumen

Perencanaan Yang tersusun tepat waktu. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sebesar **Rp. 78.900.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

5) **PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**

Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator Programnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara dalam Kondisi Baik. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **10 Unit**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ sebesar **Rp. 58.768.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

Untuk mendukung Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ diimplementasikan dengan 1 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan dengan alokasi dana **Rp. 58.768.000** yang dialokasikan dengan **maksud** sebagai salah satu fasilitas dan informasi untuk Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. **Tujuan** dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk sebagai rumusan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara dengan target **10 Unit**. Realisasi target adalah **10 unit** atau **100%**. Dengan realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

6) **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**

Program ini dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan di bidang perhubungan darat maupun laut. Indikator programnya adalah Persentase peningkatan layanan angkutan. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar **Rp. 1.390.873.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

Untuk mendukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan diimplementasikan dengan 5 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengawasann kawasan pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan dengan alokasi dana **Rp. 217.500.000**, yang dialokasikan dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pemenuhan keselamatan pelayanan dan keselamatan penumpang di bidang perhubungan laut. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayaran. Output dari kegiatan ini adalah frekuensi pengawasan dan pengendalian sungai danau dan penyeberangan dengan target **16 kali**. Realisasi target adalah **16 kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- b. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 191.300.000**, yang dialokasikan dengan maksud untuk melakukan konsultasi, koordinasi guna menciptakan sinergi antara dinas perhubungan dengan TNI dan Kepolisian satlantas. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Outpu dari kegiatan ini adalah melakukan rapat – rapat koordinasi mengenai rekayasa lalu lintas dan forum LLAJ dengan target **4 kali**. Realisasi target adalah **4 Kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- c. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamaan Penumpang dilingkungan Terminal dengan alokasi anggaran **Rp.599.880.000**, yang dialokasikan dengan maksud Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan darat dengan mengatur jadwal operasional, menyediakan area tunggu dan fasilitas penunjang lainnya. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan kemananan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga operasional terminal terlaksana dan tertata dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen operasional yang tersusun dengan target **2 Dok**.

Realisasi target adalah **2 Dok** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

- d. Kegiatan Penciptaan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan dengan alokasi anggaran **Rp. 215.355.000**, yang dialokasikan dengan Maksud Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan darat dengan mengatur jadwal operasional, menyediakan area tunggu dan fasilitas penunjang lainnya. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga operasional pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan terlaksana dan tertata dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen operasional yang tersusun dengan target **2 Dok**. Realisasi target adalah **2 Dok** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- e. Kegiatan Posko Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah dengan alokasi dana **Rp. 166.838.000**, yang dialokasikan dengan maksud sebagai Peningkatan pengawasan dan pengendalian LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas pada saat pelaksanaan hari hari besar nasional dan daerah. **Tujuan** dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan optimal bagi pengguna transportasi sehingga terciptanya tertib lalu lintas angkutan jalan dan mengurangi angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut pada saat pelaksanaan hari hari nasional dan daerah. Output kegiatan ini adalah Jumlah pengamanan pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan dengan target **8 Kali**. Realisasi target sebesar **8 kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

7) **PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan tertib laik uji kendaraan bermotor sehingga terciptanya tertib kendaraan yang memenuhi standar laik jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Indikator programnya adalah Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan. Adapun alokasi anggaran untuk Program

Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar **Rp. 8.800.000**. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar **Rp. 8.800.000** dengan target **1.210 Unit** atau **100%**.

Untuk mendukung Program Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar **Rp. 8.800.000** , yang dialokasikan dengan maksud terciptanya penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. **Tujuan** dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tertib standar laik jalan angkutan pengguna transportasi sehingga dapat meningkatkan Retribusi di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan dengan target **1.210 Unit**. Realisasi target sebesar **Unit** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar **Unit** atau **100%**.

8) **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. Indikator programnya adalah frekuensi pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Adapun alokasi anggaran untuk Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas **Rp. 666.920.000**, Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar **Rp. 666.920.000** dengan target **30 Kali** atau **100%**.

Untuk mendukung Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Operasional, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas dengan alokasi dana sebesar **Rp. 666.920.000**, yang dialokasikan dengan maksud terciptanya keamanan dan kenyamanan serta efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. **Tujuan**

dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keselamatan kepada pengguna transportasi melalui pengaturan lalu lintas dan raja kelengkapan standar laik jalan angkutan. Output dari kegiatan ini adalah frekuensi pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas melalui pengamanan lalu lintas angkutan jalan dengan target **30 Kali**. Realisasi target sebesar **30 Kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar **Rp. 666.920.000** atau **100%**.

1. Faktor penyebab terpenuhinya dan permasalahan tidak terpenuhinya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2019

Faktor Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-kadang dilapangan

menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
4. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya.
5. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran.

2. Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan tahun 2019 :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jasa transportasi pada bidang darat maupun laut dengan Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

5. Menurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut.
6. Meningkatnya PAD pada sektor Terminal, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepelabuhan
7. Meningkatnya tertib laik kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar.

3. Kebijakan/solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas



TABEL 2.2
PENGUKURAN KINERJA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 (TRIWULAN III)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018			Target Realisasi 2019										(KURU RANG) /LEBIH	
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Tw I		Tw II		Tw III		Tw IV		Realisasi		Capaian
							K	%	K	%	K	%	K	%			
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal	Rp80.000.000	Rp84.400.000	105,50%	Rp80.000.000	Rp8.395.000	10,49%	Rp22.529.000	28,16%	Rp52.786.000	65,98%	-	-	-	-	Rp27.214.000
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp150.000.000	Rp130.229.000	86,82%	Rp150.000.000	Rp21.283.000	14,19%	Rp61.555.000	41,04%	Rp95.301.000	63,53%	-	-	-	-	Rp54.699.000
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Rp100.000.000	Rp141.906.000	141,91%	Rp100.000.000	Rp14.055.000	14,06%	Rp59.630.000	59,63%	Rp115.835.800	115,84%	-	-	-	-	-Rp15.835.800
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	30	67	223,33%	20	20	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3	0	0,00%	3	0	0,00%	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1188 Unit			1210 Unit											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor transportasi darat, sungai dan penyeberangan .
 - Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi pada terminal
 - Indikator 2 : Persentase peningkatan retribusi pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Indikator 3 : Persentase peningkatan retribusi pada sektor Kepelabuhan
2. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut
 - Indikator 1 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat
 - Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi laut
3. Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum
 - Indikator 1 : Persentase kendaraan yang laik jalan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3 (table T-C.30) sebagai berikut :

RANCANGAN RENCANA KERJA



TABEL 2.3 (tabel T-C 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis	KET
			Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	tahun 2019 triwulan III	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	7	10	13	14	15	16	17	18	19		
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	Rp70.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp72.254.000	Rp84.400.000	Rp52.786.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Belum terpenuhi (65,98%)	
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp165.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp161.881.000	Rp130.229.000	Rp95.301.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Belum terpenuhi (63,53%)	
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Rp70.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp125.926.500	Rp141.906.000	Rp115.835.800	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Sangat Terpenuhi (115,48%)	
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	40	30	20	10	87	67		10	5		
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	3	3	2	2	0			2	0	
3	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1170 Unit	1188 Unit	1210 Unit	1300 Unit				1300 Unit	1350 Unit		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan.

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

- 1. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:**
 - a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
 - b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
 - c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

- 2. Permasalahan, Dampak/peluang Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran Kabupaten. Tanjung Jabung Barat**
Urusan Perhubungan
 - a. STRENGTHS (KEKUATAN):
 1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
 2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
 3. Regulasi yang mendukung.
 - b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):
 1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
 2. Anggaran yang kurang memadai;
 3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
 4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
 5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.
 - c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :
 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
 2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.

3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi
- e. Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. kepada masyarakat dalam jangka panjang.Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
 2. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
 3. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;
 4. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
6. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
7. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
9. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota.

2.4.1. Review Terhadap Analisis Kebutuhan Anggaran Dinas Perhubungan

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2021 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah

2. Dukungan RPJMN 2016 – 2021 dan RKP 2018;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

RANCANG RENCANA KERJA

Tabel 2.4 (tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	DISHUB	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	12 Bulan	924,400,000	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	DISHUB	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	12 Bulan	659,677,779	APBD
	penyediaan jasa surat menyurat	DISHUB	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	5,400,000	penyediaan jasa surat menyurat	DISHUB	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	2,400,000	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	DISHUB	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	340,000,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	DISHUB	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	98,000,000	APBD
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DISHUB	peningkatan prasarana transportasi	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DISHUB	peningkatan prasarana transportasi	12 Bulan	79,300,000	APBD
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DISHUB	Tersedianya administrasi keuangan	12 Bulan	130,000,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DISHUB	Tersedianya administrasi keuangan	12 Bulan	131,280,000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DISHUB	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	13,500,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DISHUB	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	19,434,162	APBD
	Penyediaan alat tulis kantor	DISHUB	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan alat tulis kantor	DISHUB	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	42,351,017	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISHUB	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISHUB	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	14,200,000	APBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISHUB	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	6,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISHUB	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	4,539,600	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	DISHUB	Tersedianya jasa media cetak dan elektronik	12 Bulan	8,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISHUB	Tersedianya jasa media cetak dan elektronik	12 Bulan	6,000,000	APBD
	Penyediaan makanan minuman	DISHUB	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	6,500,000	Penyediaan makanan minuman	DISHUB	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12,000,000	APBD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DISHUB	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	12 Bulan	260,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DISHUB	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 Bulan	250,173,000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISHUB	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	1,211,250,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISHUB	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	684,580,000	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	Jumlah Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	Jumlah Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	30,000,000	APBD
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpenuhnya perlengkapan gedung kantor	16 Unit	106,250,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpenuhnya perlengkapan gedung kantor	16 Unit	15,000,000	APBD
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Tersedianya peralatan gedung kantor	4 Unit	45,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Tersedianya peralatan gedung kantor	4 Unit	16,000,000	APBD
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DISHUB	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	32 unit	600,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DISHUB	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	32 unit	35,600,000	APBD
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	5 unit	360,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	5 unit	562,480,000	APBD
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	54 unit	100,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	54 unit	25,500,000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

	Program peningkatan disiplin aparatur	DISHUB	Jumlah Pakaian Dinas tersedia	132 stel	135,000,000	Program peningkatan disiplin aparatur	DISHUB	Jumlah Pakaian Dinas tersedia	132 stel	136,800,000	APBD
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	DISHUB	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	132 stel	135,000,000	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	DISHUB	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	132 stel	136,800,000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISHUB	Persentase Meningkatnya kinerja pelayanan kantor	100%	60,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISHUB	Persentase Meningkatnya kinerja pelayanan kantor	100%	-	APBD
	Pendidikan dan pelatihan formal	DISHUB	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	2 Orang	60,000,000	Pendidikan dan pelatihan formal	DISHUB	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	-	-	APBD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu	6 Dok	80,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu	6 Dok	33,800,000	APBD
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dok	80,000,000	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dok	33,800,000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DISHUB	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang	2 Dok	160,000,000	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DISHUB	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang	2 Dok	-	APBD
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kantor Dishub, UPT Sarana dan Prasarana DAN Halte Sungai	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	2 Dok	160,000,000	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kantor Dishub, UPT Sarana dan Prasarana DAN Halte Sungai	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	-	-	APBD
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	13 Unit	500,000,000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	13 Unit	150,000,000	APBD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	terlaksananya kegiatan pemeliharaan pelabuhan dermaga dan halte sungai	13 Unit	500000000	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	terlaksananya kegiatan pemeliharaan pelabuhan dermaga dan halte sungai	13 Unit	150000000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB	Persentase peningkatan layanan keamanan kenyamanan angkutan dan penumpang	100%	1,911,000,000	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB	Persentase peningkatan layanan keamanan kenyamanan angkutan dan penumpang	100%	967,025,000	APBD
Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dan Parkir	UPT Sarana prasarana	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	2 dokumen	800,000,000	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dan Parkir	UPT Sarana prasarana	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	2 dokumen	31,800,000	APBD
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	DISHUB	Jumlah terpilihnya sopir/juru ,mudik/awak kendaraan angkutan teladan	2 orang	50,000,000	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	DISHUB	Jumlah terpilihnya sopir/juru ,mudik/awak kendaraan angkutan teladan	-	-	APBD
Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	16 Kali	321,000,000	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	16 Kali	670,800,000	APBD
Forum lalu lintas angkutan jalan	DISHUB	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	4 kali	250,000,000	Forum lalu lintas angkutan jalan	DISHUB	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	4 kali	13,200,000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	DISHUB dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah pelayanan posko ramdhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	8 Kali	220,000,000	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	DISHUB dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah pelayanan posko ramdhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	8 Kali	170,000,000	APBD
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungan dan pelabuhan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	2 Kali	270,000,000	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungan dan pelabuhan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	2 Kali	81,225,000	APBD
Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		Jumlah menurunnya Pelanggaran Darat	20 Kasus	1,045,000,000	Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		Jumlah menurunnya Pelanggaran Darat	20 Kasus	715,760,000	APBD
Pengadaan Rambu lalu Lintas		Rasio Rambu terpsang (pada Titik rawan kecelakaan)	30	265,000,000	Pengadaan Rambu lalu Lintas		Rasio Rambu terpsang (pada Titik rawan kecelakaan)	-	-	APBD
		- Rambu	200				- Rambu	200		APBD
		- Marka Jalan	150				- Marka Jalan	150		APBD
		- Guardraill	3				- Guardraill	3		APBD
		- RPPJ	35				- RPPJ	35		APBD
Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten	Jumlah terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	30 Kali	780,000,000	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten	Jumlah terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	30 Kali	715,760,000	APBD

RANCANG RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	2400 Uni	140,000,000	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	-	-	APBD
Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang telah diuji	2400 Uni	140000000	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang telah diuji	-	-	APBD
Jumlah				6,166,650,000	Jumlah				3,347,642,779	APBD

2.4.2. Review Terhadap Forum OPD

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembanunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 ayat (1) "Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130.

Proses pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Opd melalui Rapat Forum Perangkat Daerah dalam Rangka RKPD Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2020 di Ruang Rapat pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Dari Semua Usulan Kecamatan dan POKIR DPRD yang masuk pada Aplikasi SIPD Perencanaan, Rencana Pembangunan Halte Sungai diprioritaskan mengusulkan 1 usulan untuk setiap kecamatan, dikarenakan Pemerataan dan Keterbatasan Anggaran.
2. Usulan baru Rencana Pembangunan Halte Sungai terdapat pada Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Seberang Kota.
 - Kecamatan Kuala Betara
Rencana pembangunan Halte Sungai di Desa Suak Labu RT. 01 Kecamatan Kuala Betara
 - Kecamatan Tungkal Ilir
Rencana Pembangunan Halte Sungai di Parit 04 RT. 06 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir
 - Kecamatan Bram itam

Rencana Pembangunan Halte Sungai di Desa Semau Rt. 01 Kecamatan Bram Itam

- Kecamatan Pengabuan

Rencana pembangunan Halte Sungai di Desa Mekar Jati RT.05 Dusun Sungai Nibung Kecamatan Pengabuan

- Kecamatan Senyerang

Rencana Pembangunan Halte Sungai di Parit Horisom RT. 09 Desa Lumahan Kecamatan Senyerang

- Kecamatan Seberang Kota

Rencana Pembangunan Halte Sungai di Puskesmas Rawat Inao Kelurahan Tungkal V Parit 20 RT. 03 Kecamatan Seberang Kota

3. Sehubungan gagalnya pembangunan halte sungai di Desa Parit Pudin Rt. 02 akibat kondisi lokasi secara teknis tidak dimungkinkan, sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat dengan BPTD Wilayah v Provinsi Jambi dan Dinas perhubungan provinsi Jambi akan di Prioritaskan Untuk dibangun di tahun anggaran 2021. Dengan catatan pemerintah daerah akan menyusun kembali dokumen perencanaan dilokasi yang baru yang berada di alamat yang sama
4. Untuk Rencana Pembangunan Halte Sungai di Kelurahan Tungkal V Parit 20 Rt. 03 Kecamatan Seberang Kota yang sudah masuk dalam aplikasi SIPD Perencanaan di Alihkan Lokasinya ke Parit Ijab Kuala Rt. 12 Desa teluk Pulau raya Kecamatan Seberang Kota. Karena berdekatan dengan Halte yang sudah dibangun di Kelurahan Tungkal V
5. Untuk Rencana Pembangunan Halte Sungai di Tungkal IV Desa Kecamatan Seberang Kota diusulkan ke Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya telah diusulkan ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

2.5. Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

c. VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD	“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “
Misi RPJMD :	
Misi 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas
Misi 2	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
Misi 3	: meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan

Misi 4	: Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
--------	--

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 1 RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktural Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas. Dengan sasaran 1.1 yaitu Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan konektivitas

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (TABEL 3.2

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2016-2021 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 1. Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan
8. Program Peningkatan Pelayanan dan Angkutan
 1. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Dan Parkir
 2. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan
 3. Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai Dan Penyeberangan

4. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
5. Kegiatan Posko Pengamanan Hari – Hari Besar Nasional Dan Daerah
6. Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyeberangan
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 1. Operasional Pengawasan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
 2. Pengadaan Rambu Lalu Lintas

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 4 program dengan total kegiatan 13 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 33 kegiatan

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya. Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Program Peningkatan administrasi perkantoran;
Indikator Kinerja : Persentase kepuasan aparatur
2. Program Peningkatan sarana prasarana aparatur;
Indikator Kinerja : Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kineja : Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia
4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
Indikator Kinerja : Prosentase sumber daya apartur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM.
5. Peningkatan pengembang sistem pelaporan capaian kinerja;
Indikator Kinerja : Nilai AKIP
6. Perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi
7. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar

8. Peningkatan pelayanan angkutan
Indikator Kinerja :Persentase Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan
9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indikator Kinerja : jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas

C. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

Tabel 3.2
Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000.000
	Retribusi Jasa Usaha	
2.	Retribusi Terminal	Rp. 80.000.000
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp. 100.000.000
	Jumlah	

Tabel 3.1 (table T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													4,743,758,446					
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,095,714,446					
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													345,000,000					
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	pembang unan dermaga apung beton	Tersedian a Dokumen Perencnaa n, Penggaa ngan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n					1 doku men	1 doku men	12 Doku men	12 Doku men	33,772,363	33,772,363	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m				345,000,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													150,972,000					
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan	Tersedian a Laporan Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n					12 BULA N	12 BULA N	1 Lapor an	1 Lapor an	3,268,090,669	2,870,223,200	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i				0

2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedia Laporan Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	143,970,000	143,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				150,972,000
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										42,000,000	42,000,000					0
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedia Kartu Inventaris/Dokumen Aset	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	1 Dokumen	42,000,000	42,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										48,000,000	98,000,000					207,320,000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			125 stel	125 stel	125 Orang	125 Orang	48,000,000	48,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				157,320,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis			30 Orang	30 Orang	125 Orang	125 Orang	0	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										213,290,313	638,997,768					413,153,160
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen	Administrasi Umum Meningkatkan	Kab. Tanjung Jabung			12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	4,536,758	4,536,758	Dana Transfer				5,220,540

2	1	01	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										458,160,200	653,510,200					161,460,000	
2	1	01	2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Administrasi Umum Meningkatkan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			32 unit 12 bulan	32 unit 12 bulan	100 %	100 %	365,550,000	454,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				91,195,000
2	1	01	2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum Meningkatkan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			54 unit	54 unit	100 %	100 %	25,310,200	25,310,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				29,325,000
2	1	01	2.	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum Meningkatkan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 unit	2 unit	100 %	100 %	67,300,000	173,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40,940,000
2	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										714,740,000	714,740,000					1,018,624,000	
2	1	02	2.		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										589,180,000	589,180,000					823,124,000	
2	1	02	2.	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan LLAD	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	12 BULAN	12 BULAN	589,180,000	589,180,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				823,124,000

						Kabupaten/Kota																					
2	15	03	2.11			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau												0	350,000,000								350,000,000
2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Penyusunan Dokumen Perencanaan Halte Sungai	Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Parit Bilal Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Harapan Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Muaraseberang Kab. Tanjung Jabung Barat, Bramitam, Semau Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Sungaidualap Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Sungaidungun						7 Unit	7 Unit		0	350,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					350,000,000			

								Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyeran g, Lumahan															
2	1	03	2.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											0	508,000,000							508,000,000
2	1	03	2.	03	Pengoperasia n dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Pemelihar aan Halte Sungai		Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Betara Kanan		8 Unit	8 Unit			0	508,000,000	Dana Transf er Umu m - Dana Bagi Hasil					508,000,000	
TOTAL													5,580,368,632	7,394,327,735					10,508,297,642				

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, selanjutnya Renja Tahun 2021 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

Kuala Tungkal, 9 September 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001

TABEL 3.3
DAFTAR USULAN POKIR DPRD TAHUN 2021

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN						
NO	USULAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	PENGUSUL	KET
1	Rencana Pembangunan Halte Sungai di Desa Suak Labu RT.01 Kecamatan Kuala Betara	1 Paket	Rp50,000,000.00	APBD		
2	Rencana Pembangunan Halte Sungai di Parit 04 RT. 06 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir	1 Paket	Rp50,000,000.00	APBD		
3	Rencana Pembangunan Halte Sungai di Desa Semau RT.01 Kecamatan Bramitam	1 Paket	Rp50,000,000.00	APBD		
4	Rencana Pembangunan Halte Sungai di Desa Mekar Jati RT.05 Dusun Sungai Nibung Kecamatan Pengabuan	1 Paket	Rp50,000,000.00	APBD		
5	Rencana Pembangunan Halte Sungai di Parit Horisom RT. 09 Desa Lumahan Kecamatan Senyerang	1 Paket	Rp50,000,000.00	APBD		
6	Rencana Pembangunan Halte Sungai di Puskesmas Rawat Inap Kelurahan Tungkal V Parit 20 RT.03 Kecamatan Seberang Kota	1 Paket	Rp50,000,000.00	APBD		
JUMLAH			Rp300,000,000.00	APBD		

NO	Program Kegiatan	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	LOKASI	KETERANGAN
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT							
1.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan						
	Simpang Tiga Bram Itam sampai ke Teluk Nilau.						
1	Rambu Lalu Lintas	50	Buah	Rp 1,600,000	Rp 80,000,000	Jalan Provinsi terhubung ke Jalan Nasional	APBD PROV
2	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	4	Buah	Rp 13,500,000	Rp 54,000,000	Jalan Provinsi terhubung ke Jalan Nasional	APBD PROV
3	Guadrail	300	Meter	Rp 1,550,000	Rp 465,000,000	Jalan Provinsi terhubung ke Jalan Nasional	APBD PROV
	Jalan Nasional dalam Kota Kuala Tungkal						
1	Traffict Light Solar Cell Simpang Polwan Jl. Sriwijaya Kuala Tungkal 3 simpang	1	Paket	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	Jl. Nasional/Jl. Sriwijaya, Kec. Tungkal Ilir	APBD PROV/ APBN
2	Warning Light Jl. Patunas 3 titik simpang SMU N 1	1	Paket	Rp 117,000,000	Rp 117,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBD PROV/ APBN
3	Warning Light Jl. Manunggal II/ Jl. Lintas roro 4 Titik	1	Paket	Rp 156,000,000	Rp 156,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBD PROV/ APBN
4	Zebra Cross Traffict Light 4 titik simpang jl. Siswa	250	Meter	Rp 130,000	Rp 32,500,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBD PROV/ APBN
5	Zebra Cross Traffict Light 3 Titik Simpang Jl. Jendral Sudirman	200	Meter	Rp 130,000	Rp 26,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBD PROV/ APBN
6	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	8	Unit	Rp 13,500,000	Rp 108,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBD PROV/ APBN
7	Pita Penggaduh	500	m	Rp 130,000	Rp 65,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBD PROV/ APBN
8	Zona Selamat Sekolah (ZOOS) SDN No 4 Kec. Tungkal Ilir	1	Paket	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBN
9	Zona Selamat Sekolah (ZOOS) SDN No 18 Kec. Tungkal Ilir	1	Paket	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	Jalan Kabupaten Terhubung ke Jalan Nasional/ jl. Lintas pelabuhan roro	APBN
10	Zona Selamat Sekolah (ZOOS) PonPes Al Baqiyatus Shalihat Kuala Tungkal	1	Paket	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	Jalan Nasional	APBN

Jalan Nasional Kec. BETARA							
1	Rambu Lalu Lintas	64	buah	Rp 1,500,000	Rp 96,000,000	Jalan Nasional	APBD PROV/ APBN
2	Warning Light 1 Depan Mako Brimob	1	Paket	Rp 117,000,000	Rp 117,000,000	Jalan Nasional	APBD PROV/ APBN
Fasilitas yang dibutuhkan di Penujian Kendaraan Bermotor							
1	Abselload Beem	1	Unit	Rp 360,000,000	Rp 360,000,000	Pengujian Kendaraan Bermotor	APBN
2	Alat Kunci Roda	1	Unit	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	Pengujian Kendaraan Bermotor	APBN
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN							
2	Pembangunan Halte Sungai						
1	Sungai Jering Desa Sungai Jering Kecamatan Pengabuan	1	Paket	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	Kecamatan Pengabuan	APBN
2	Sungai Pampang Desa Sungai Pampang Kecamatan Pengabuan	1	Paket	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	Kecamatan Pengabuan	APBN
3	Rambu lalu Lintas Sungai	50	Unit	Rp 7,000,000	Rp 350,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi	APBD PROV/ APBN
Fasilitas yang dibutuhkan di Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal							
1	Jembatan Timbang 7,5	1	unit	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal	APBN
2	Rencana Penambahan Dermaga Dua	1	unit	Rp 30,500,000,000	Rp 30,500,000,000		APBN
JUMLAH					Rp 40,076,500,000		

Kuala Tungka, Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. TANJUNGPABUNG BARAT



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001